

REALISASI ANGGARAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL  
(STUDI KUALITATIF PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 JAKARTA SELATAN)

**Muhammad Kemal Idris**

*email: [kemal.idrismuhammad@gmail.com](mailto:kemal.idrismuhammad@gmail.com)*

**Taufikul Ichsan**

*email: [taufikul.ichsan@akuntansi.pnj.ac.id](mailto:taufikul.ichsan@akuntansi.pnj.ac.id)*

**Nedsal Sixpria**

*email: [nedsal.sixpria@akuntansi.pnj.ac.id](mailto:nedsal.sixpria@akuntansi.pnj.ac.id)*

**Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta**

**ABSTRACT**

*This study aims to describe the allocation of budget realization, analyze budget realization and explain the obstacles in utilizing the social reintegration program budget for at Correctional Centers Class I South Jakarta). The research method used in this study is a qualitative descriptive method. Informants in this study were from financial staff and community advisors. The results of the research obtained are that the budget realization allocation for the social reintegration program at the Correctional Center Class I South Jakarta in 2018 and 2019 is compiled in the budget realization report allocated for the trial of the correctional observer team, Guidance & Supervision by the Correctional Center and Juvenile Justice Assistance. Through the budget realization report, it can be known about the value of economic resources used to carry out government operational activities, namely the social reintegration program at the Class I Correctional Center in South Jakarta for Correctional Clients as a government agency. Obstacles in utilizing the social reintegration program budget for Class I South Jakarta Correctional Center in 2018 and 2019 are generally caused by inmates, Inadequate facilities and infrastructure, Barriers from internal and external factors.*

**Keywords:** *Budget Realization, Social Reintegration Program, Correctional Center*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alokasi realisasi anggaran, mendeskripsikan realisasi anggaran dan menjelaskan hambatan dalam pemanfaatan anggaran program reintegrasi sosial Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan tahun 2018 dan 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu dari staf keuangan dan pembimbing kemasyarakatan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Alokasi realisasi anggaran program reintegrasi sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan pada tahun 2018 dan 2019 disusun dalam laporan realisasi anggaran yang dialokasikan untuk sidang tim pengamat masyarakat, Pembimbingan & Pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan dan Pendampingan Peradilan Anak. Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui mengenai nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan yaitu program reintegrasi sosial di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan pada Klien Pemasyarakatan sebagai suatu instansi pemerintah. Hambatan dalam pemanfaatan anggaran program reintegrasi sosial Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan tahun 2018 dan 2019 secara umum disebabkan oleh Warga binaan, Kurang memadainya sarana dan prasarana, Hambatan dari faktor internal dan eksternal.

**Kata Kunci:** Realisasi Anggaran, Program Reintegrasi Sosial, Balai Pemasyarakatan

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Paradigma pemerintahan dewasa ini mengacu pada optimalisasi efisiensi instansi pemerintahan yang profesional, jujur, adil dan transparan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Disebutkan dalam Undang-Undang Pelayanan Publik 2009 bahwa setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk kegiatan pelayanan publik harus menjunjung tinggi asas akuntabilitas. Dengan

mengetahui kualitas tingkat kinerja tersebut, maka pihak instansi pemerintahan dapat melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap apa yang telah dan akan dihasilkan dalam suatu program.

Balai Pemasarakatan yang merupakan pelayanan publik memiliki tugas dalam melakukan pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, serta dapat aktif berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Balai Pemasarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan sebagai salah satu instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan yang disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Laporan realisasi anggaran digunakan untuk mengetahui nilai yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, serta mengevaluasi suatu entitas.

### Permasalahan

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana alokasi realisasi anggaran program reintegrasi sosial Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan pada tahun 2018 dan 2019?
2. Bagaimana realisasi anggaran program reintegrasi sosial Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan pada tahun 2018 dan 2019?
3. Faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam pemanfaatan anggaran program reintegrasi sosial Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan tahun 2018 dan 2019?

### Tujuan

Merujuk pada permasalahan dan pertanyaan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan alokasi realisasi anggaran program reintegrasi sosial Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan pada tahun 2018 dan 2019.
2. Mendeskripsikan realisasi anggaran program reintegrasi sosial Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan pada tahun 2018 dan 2019
3. Mendeskripsikan hambatan dalam pemanfaatan anggaran program reintegrasi sosial Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan tahun 2018 dan 2019.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

#### Tujuan Pelayanan Publik

Menentukan pelayanan yang disediakan, apa saja macamnya; Memperlakukan pengguna layanan, sebagai customers; dengan berusaha memuaskan pengguna layanan (masyarakat), sesuai dengan yang diinginkan mereka; Mencari dengan cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan berkualitas; Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan. Terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu

1. Organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah,
2. Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan
3. Kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

#### Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik dapat juga didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purposive activity) untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Yuesti, dkk, 2020).

#### Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik terdiri dari elemen-elemen yaitu Perencanaan Publik untuk mengantisipasi masa depan menurut tujuan yang ditetapkan dengan melakukan

persiapan yang didasarkan pada data informasi yang tersedia saat ini.

### Laporan Keuangan Sektor Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Pemerintah dituntut untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh instansi Pemerintah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 periode pelaporan.

### Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa komponen-komponen yang terdapat dalam satu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### Anggaran Sektor Publik

Anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu (Bastian, 2010). Anggaran sektor publik merupakan rencana operasi keuangan suatu organisasi yang diwujudkan dalam bentuk finansial dan disusun secara sistematis untuk periode waktu tertentu yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran tersebut.

### Fungsi Anggaran Sektor Publik

fungsi utama yaitu sebagai berikut (Halim dan Kusufi, 2016):

1. Anggaran sebagai alat perencanaan dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar (*overspending*), terlalu rendah (*underspending*), salah sasaran (*misappropriation*) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (*misspending*).
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

### Anggaran Biaya

Anggaran yang harus disusun perusahaan terdiri dari berbagai jenis anggaran, tetapi pada dasarnya anggaran perusahaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok anggaran, yaitu Rudianto (2012). Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu, anggaran operasional mencakup: Anggaran Pendapatan; Anggaran Biaya dan Anggaran Laba.

### Anggaran Keuangan

Anggaran keuangan adalah anggaran yang berkaitan dengan rencana pendukung aktivitas operasi perusahaan Anggaran keuangan mencakup beberapa jenis anggaran, yaitu: Anggaran Investasi, Anggaran kas, Proyeksi Neraca.

### Laporan Realisasi Anggaran (*Budgeting Realization Report*)

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasi di akhir periode (Bastian, 2010). Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Melalui laporan realisasi anggaran dapat diketahui prediksi tentang sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah serta resiko ketidakpastian atas sumber daya ekonomi tersebut. Tujuan pelaporan realisasi anggaran juga adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding

### Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial merupakan salah satu proses mengembalikan hubungan sosial

Klien pemasyarakatan Pemasyarakatan dengan masyarakat agar menjadi hubungan sosial yang utuh dan menjadi satu kesatuan, serta Klien pemasyarakatan Pemasyarakatan memiliki kesempatan berinteraksi sosial dengan lingkungan masyarakat tanpa adanya sikap diskriminasi atau sikap saling merugikan (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012).

Reintegrasi sosial diberikan guna untuk memberikan motivasi dan kesempatan kepada Klien pemasyarakatan Pemasyarakatan untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, pendidikan, keterampilan guna mempersiapkan diri di tengah masyarakat serta mendorong peran serta masyarakat untuk secara aktif ikut serta mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

Jenis Reintegrasi Sosial: Pembebasan Bersyarat; Cuti Bersyarat; Cuti Menjelang Bebas; Cuti mengunjungi keluarga;

Upaya Reintegrasi Sosial: Penelitian Kemasyarakatan; Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan; Pendampingan dan Pengawasan.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Moleong 2016). Objek penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran tahun 2018 dan 2019 program reintegrasi sosial pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian dibagi atas data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari wawancara kepada Pembimbing Kemasyarakatan dan Staf Keuangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara semi terstruktur (*semistandardized interview*) dan observasi tidak berpartisipasi (*non-participant observer*).

Dalam penelitian ini, terdapat metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Analisis data meliputi pengurangan data akumulasi menjadi ukuran yang dapat diolah, mencari pola, dan mengembangkan ringkasan (Cooper dan Schindler, 2017). Terdapat tiga tahapan dalam analisis data, yaitu: a) reduksi data, menggunakan data primer berupa wawancara dan data skunder berupa laporan realisasi anggaran. b)

Organisasi data, menyajikan data ke dalam bab dan sub-bab yang telah dibuat sebelumnya dengan menggunakan data yang sudah di reduksi dengan membuat narasi agar mudah dipahami. c) Interpretasi Data, setelah melakukan reduksi dan organisasi data, membandingkan temuan dengan terori yang digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat ditarik kesimpulan laporan realisasi anggaran program reintegrasi sosial pada Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan tahun 2018 dan 2019.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Profil Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Selatan**

Bapas Jakarta Selatan mulai didirikan pada tanggal 7 Februari 1995 yang merupakan pemekaran dari Balai Pemasyarakatan Jakarta Barat dan Selatan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.226.KP.04.04 tahun 1995. Lahirnya Lembaga baru di lingkungan Pemasyarakatan, yaitu Kantor BISPA (Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sebagai Unit Pelayanan Teknis/ UPT) Pembinaan Luar Lembaga Pemasyarakatan, kemudian kantor Bispa berubah menjadi Balai Bispa yang kemudian nomenklturnya berubah menjadi Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PR.07.03 Tanggal 12 Pebruari 1997 dan Kantor Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Jakarta Selatan saat ini beralamat di Jl. Moch. Kahfi II No. 42 A Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

##### **Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan**

Tabel 1. Alokasi Anggaran Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan

Uraian	Realisasi	
	2018	2019
<b>Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan:</b>		
- Belanja Bahan	11.520.000	4.269.275
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.865.000	0

Berdasarkan alokasi realisasi anggaran Sidang Tim Pengamat Masyarakat pada tahun 2018 – 2019 dapat diketahui bahwa biaya yang dianggarkan untuk tahun 2018 sebesar Rp.14.620.000 tidak semuanya terpakai, hanya sebesar Rp. 14.385.000 atau 98,39% yang terpakai dan sisanya atau selisihnya sebesar Rp.235.000 atau 1.61% merupakan biaya yang tidak terpakai. Sementara realisasi anggaran yang dianggarkan untuk tahun 2019 sebesar Rp.6.052.000 tidak semuanya terpakai, hanya sebesar Rp. 4.269.275 atau 70,54% yang terpakai dan sisanya atau selisihnya sebesar Rp.1.782.725 atau 29,46% merupakan biaya yang tidak terpakai.

Perbedaan yang signifikan dari anggaran yang digunakan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 umumnya disebabkan oleh pemangkasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan operasional Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan dan juga Sidang Tim Pengamat Masyarakat dilakukan di kantor Balai Masyarakat Kelas 1 Jakarta Selatan sehingga tidak memerlukan anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota.

#### Alokasi dan Realisasi Anggaran Pembimbingan dan Pengawasan

Tabel 2. Alokasi Anggaran Pembimbingan & Pengawasan pada tahun 2018 - 2019

Uraian	Realisasi	
	2018	2019
<b>Pembimbingan &amp; Pengawasan Oleh Balai Masyarakat:</b>	182.713.350	2.685.500
A. Penyusunan Litmas Pembimbingan	96.049.600	0
- Belanja Bahan	1.049.600	0
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	95.000.000	0
B. Pelaksanaan Pembimbingan	49.350.000	2.320.000
1. Bimbingan Kemandirian (Fasilitator)	25.000.000	700.000
- Belanja Bahan	0	0

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.000.000	700.000
2. Bimbingan Kepribadian (Fasilitator)	24.000.000	1.200.000
- Belanja Bahan	0	200.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	24.000.000	1.000.000
3. Bimbingan Lanjutan (Fasilitator)	350.000	1.200.000
- Belanja Bahan	0	200.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	350.000	220.000
C. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	37.313.750	365.500
- Belanja Bahan	2.958.750	365.500
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	34.355.000	0

Berdasarkan alokasi realisasi anggaran untuk Pembimbingan & Pengawasan oleh Balai Masyarakat pada tahun 2018 – 2019 dapat diketahui bahwa biaya yang dianggarkan untuk tahun 2018 sebesar Rp.182.850.000 tidak semuanya terpakai, hanya sebesar Rp. 182.713.350 atau 99,93% yang terpakai dan sisanya atau selisihnya sebesar Rp.136.650 atau 0,07% merupakan biaya yang tidak terpakai. Sementara efisiensi realisasi anggaran biaya yang dianggarkan untuk Pembimbingan & Pengawasan oleh Balai Masyarakat tahun 2019 sebesar Rp.9.410.000 tidak semuanya terpakai, hanya sebesar Rp.2.685.500 atau 28,54% yang terpakai dan sisanya atau selisihnya sebesar Rp.6.724.500 atau 71,46% merupakan biaya yang tidak terpakai. Realisasi anggaran untuk Pembimbingan & Pengawasan oleh Balai Masyarakat pada tahun 2019 sangat rendah karena hanya 28,54%.

Perbedaan yang signifikan dari anggaran yang digunakan pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 umumnya disebabkan oleh pemangkasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan operasional Pemilihan Umum tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan. Selain itu perbedaan signifikan anggaran tahun 2018 dengan tahun 2019

disebabkan oleh pembelian motor dinas menggunakan anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota serta menggunakan anggaran Belanja Bahan untuk pembelian laptop yang dimanfaatkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pembuatan pelaporan para Warga Binaan Sosial (WBS) pada tahun anggaran 2018, sehingga pada tahun 2019 anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota dikurangi signifikan karena masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan sudah memiliki motor dinas dan laptop. Kemudian perbedaan anggaran dari Bimbingan Kemandirian dan Keperibadian yang digunakan juga disebabkan adanya pengurangan bimbingan keterampilan yakni dengan mengalihkan bimbingan keterampilan menjahit, bimbingan keterampilan pangkas rambut dan bimbingan keterampilan bermusik kepada lembaga swasta dan lembaga milik pemerintah daerah.

#### Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran Pendampingan dan Peradilan Anak

Tabel 3. Alokasi Anggaran Pendampingan Peradilan Anak pada tahun 2018 - 2019

Uraian	Realisasi	
	2018	2019
<b>Pendampingan Peradilan Anak:</b>	91.628.075	1.000.000
A. Penyusunan Litmas Anak	31.813.075	1.000.000
- Belanja Bahan	748.575	1.000.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	31.064.500	0
B. Pelaksanaan Pendampingan Anak (Pemeriksaan Awal, Diversi, Pelimpahan)	47.225.000	0
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47.225.000	0
C. Monitoring, Evaluasi, & Pelaporan	12.590.000	0
- Belanja Bahan	510.000	0
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.080.000	0

Berdasarkan alokasi realisasi anggaran untuk Pendampingan Peradilan Anak pada tahun 2018 – 2019 dapat diketahui bahwa biaya yang dianggarkan untuk tahun 2018 sebesar Rp.91.750.000 tidak semuanya terpakai, hanya sebesar Rp.91.628.075 atau 99,87% yang terpakai dan sisanya atau selisihnya sebesar Rp.121.925 atau 0.13% merupakan biaya yang tidak terpakai. Realisasi anggaran untuk Pendampingan Peradilan Anak pada tahun 2018 hampir 100% terpakai. Sementara realisasi anggaran yang dianggarkan untuk Pendampingan Peradilan Anak tahun 2019 sebesar Rp.2.100.000 tidak semuanya terpakai, hanya sebesar Rp.1.000.000 atau 47,62% yang terpakai dan sisanya atau selisihnya sebesar Rp.1.100.000 atau 52,38% merupakan biaya yang tidak terpakai. Realisasi anggaran untuk Pendampingan Peradilan Anak pada tahun 2019 cukup rendah karena hanya 47,62%. Hanya untuk Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan Anak ada realisasi anggaran biaya sebesar Rp.1.000.000 atau 47,62%.,

Perbedaan anggaran tahun 2018 dan 2019 secara signifikan terjadi umumnya disebabkan oleh pemangkasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan operasional KPU pada Pemilihan Umum tahun 2019 oleh Kementerian Keuangan. Perbedaan signifikan disebabkan oleh pembelian motor dinas menggunakan anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota yang dimanfaatkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pembuatan pelaporan, kegiatan pendampingan sidang para Anak Berhubungan dengan Hukum (ABH) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun anggaran 2018, sehingga pada tahun 2019 anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota dikurangi signifikan karena Pembimbing Kemasyarakatan mempunyai motor dinas.

#### Hambatan dalam pemanfaatan anggaran program reintegrasi sosial Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan tahun 2018 dan 2019

Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya (Bab 2, hal. 17). Namun dalam pemanfaatan anggaran program

reintegrasi sosial Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan tahun 2018 dan 2019 terdapat beberapa hambatan yang ditemukan.

Secara umum hambatan dalam pemanfaatan anggaran program reintegrasi sosial Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan tahun 2018 dan 2019 terdiri dari faktor internal maupun faktor eksternal. Hambatan yang berasal dari faktor internal antara lain kurang memadainya sarana dan prasarana, misalnya sarana fisik seperti kelas-kelas maupun perlengkapan sebagai penunjang kegiatan Bimbingan Keterampilan.

Hambatan yang berasal dari faktor eksternal antara lain disebabkan oleh warga binaan itu sendiri, karena dalam proses reintegrasi sering terbentur sikap kemauan warga binaan yang tidak ingin berubah, mereka merasa sudah nyaman dengan kehidupan sebelumnya. Juga daya serap warga binaan yang berbeda-beda dalam menerima bimbingan. Selanjutnya kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat luar untuk menerima warga binaan secara terbuka tanpa penuh kecurigaan karena masih menganggap warga binaan adalah pelaku kriminal. Kemudian saat penyusunan anggaran, data yang diminta oleh Kanwil sebagai dasar permintaan anggaran terkadang terlalu berbelit-belit pada bagian teknis, waktu yang sangat sedikit dalam penyusunan anggaran yang diberikan oleh Kanwil dan jumlah permintaan Penelitian Kemasyarakatan yang fluktuatif, sehingga tidak bisa diprediksi anggarannya. Selain itu terdapat anggaran yang dibutuhkan untuk suatu program namun tidak tersedia dalam Kementrian.

## KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Alokasi realisasi anggaran program reintegrasi sosial di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan pada tahun 2018 dan 2019 disusun dalam laporan realisasi anggaran. Dalam alokasi anggaran tahun 2019 terdapat selisih yang signifikan dibandingkan dengan alokasi anggaran di tahun 2018, hal tersebut terjadi karena beberapa alasan diantaranya pemangkasan anggaran dari Kementrian yang dialihkan untuk kegiatan Pemilihan Umum tahun 2019, pembelian motor dinas dan laptop pada alokasi anggaran tahun 2018 serta adanya pelimpahan bimbingan

keterampilan kepada lembaga swasta maupun lembaga milik pemerintah.

- a. Realisasi anggaran untuk sidang tim pengamat pemasarakatan pada tahun 2018 dan 2019 telah dialokasikan untuk belanja bahan dan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
  - b. Realisasi anggaran untuk Pembimbingan & Pengawasan oleh Balai Pemasarakatan pada tahun 2018 dan 2019 dialokasikan untuk penyusunan kegiatan Penelitian Kemasyarakatan, Pembimbingan, Belanja Bahan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
  - c. Realisasi anggaran untuk Pendampingan Peradilan Anak pada tahun 2018 dan 2019 dialokasikan untuk Penyusunan Penelitian Kemasyarakatan Anak, Pelaksanaan Pendampingan Anak (Pemeriksaan Awal, Diversi, Pelimpahan) dan Monitoring, Evaluasi, & Pelaporan.
2. Realisasi anggaran program reintegrasi sosial Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan pada tahun 2018 rata-rata anggaran yang terpakai sebesar 99,40% dan 2019 rata-rata anggaran yang terpakai sebesar 48,90% yaitu anggaran untuk Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, Anggaran untuk pembimbingan & pengawasan oleh Balai Pemasarakatan serta Anggaran untuk pendampingan peradilan anak.
  3. Hambatan dalam pemanfaatan anggaran program reintegrasi sosial Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Selatan tahun 2018 dan 2019 disebabkan oleh faktor internal dan eksternal:
    - a. Internal: Kurang memadainya sarana dan prasarana
    - b. Eksternal: Warga binaan yang tidak ingin berubah, karena sudah nyaman dengan kehidupan sebelumnya dan daya tangkap yang berbeda-beda; masyarakat luar menganggap warga binaan adalah pelaku kriminal; saat penyusunan anggaran berbelit-belit serta tenggat waktu yang sedikit juga permintaan Penelitian Kemasyarakatan yang fluktuatif

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2016. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Cooper, Donald R., Pamela S. Schindler. 2017. *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 12, Jilid 1, Terjemahan oleh Rahma Wijayanti dan Gina Gania. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan. 2012. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Moleong, Lexy. J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Rudianto. 2012. *Pengantar Akuntansi Konsep & Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Penerbit : Erlangga, Jakarta.
- Yuesti Anik, Ni Luh Putu Sandrya Dewi dan I Gusti Ayu Asri Pramesti. 2020. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan 1. Bali: CV. Noah Aletheia.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, tidak terlepas dari beberapa pihak yang membantu penulis sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih kepada:

1. Bapak Taufikul Ichsan, S.E.,Ak., M.Ak. selaku dosen pembimbing 1 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini.
2. Bapak Nedsal Sixpria, S.E.,Ak., M.Ak. selaku dosen pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini.
3. Orang tua, kakak, dan adik atas doa dan dukungan teman-teman terdekat sehingga artikel ilmiah ini dapat selesai dengan baik.

Penulis juga menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Penulis berharap agar artikel ilmiah ini dapat memberikan manfaat tidak hanya untuk penulis sendiri tetapi dapat bermanfaat pula untuk para pembaca.

**Halaman persetujuan artikel dari dosen pembimbing**

Artikel saya berjudul

REALISASI ANGGARAN PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL  
(STUDI KUALITATIF PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS 1 JAKARTA SELATAN)

Telah selesai dikoreksi dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipublikasi

		Tanda tangan	tanggal
Mahasiswa	Muhammad Kemal Idris		29/09/2020
Dosen Pembimbing I	Taufikul Ichsan, S.E.Ak., M.Ak.		31/09/2021
Dosen Pembimbing II	Nedsal Sixpria, S.E.Ak., M.Ak.		31/09/2020